

## EVALUASI PELAKSANAAN FUNGSI KETUA RUKUN TETANGGA DALAM MEMBANTU TUGAS LURAH TIBAN LAMA KECAMATAN SEKUPANG KOTA BATAM TAHUN 2018

Arie Nugroho<sup>1</sup>, Agus Hendrayady<sup>2</sup>, Nazaki<sup>3</sup>

Nugrohoarieee03@gmail.com

Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja  
Ali Haji

### Abstract

*Government policy in order to assist the function of the Neighborhoods / Village to improve services and population administration, the government has issued a Rukun Neighbors policy as an extension of the Neighborhoods / Village Based on the policies that have been issued by the government, for this reason, researchers make an approach and offer to these policies by evaluating existing policies. This study aims to determine and analyze the evaluation of the implementation of the function of the Head of the Neighborhood Association in Assisting the Tasks of the Head of the Tiban Lama Village, Sekupang District, Batam City in 2018 and also to find out and analyze the obstacles to the Implementation of the Function of the Head of the Neighborhood Association in Helping the Tasks of the Head of the Sub-District of Tiban Lama, Sekupang District, Batam City. 2018. William N Dunn's theory of public policy evaluation regarding the level of conformity between concepts and facts. In the research, the writer used qualitative research and used descriptive method. Descriptive method is research that tries to provide as accurate a picture as possible of a particular individual, situation, or group. Thus, this study intends to collect data on the Evaluation of the Implementation of the Function of the Head of the Neighborhood Association in Helping the Tasks of the Head of the Tiban Lama Village, Sekupang District, Batam City, then the results are clearly described as happened in the field of the Implementation of the Function of the Head of the Neighborhood Association in Helping the Tasks of the Head of the Tiban Lama Village, Sekupang District, Batam City. . The results showed that the implementation of the function of the Head of the Neighborhood Association in Helping the Tasks of the Head of the Tiban Lama Village, Sekupang District, Batam City has not been carried out properly, this is evidenced by the answers of the informants in the Village of Tiban Lama, so it can also be concluded in the study that the neighborhood units have not carried out their duties properly. in accordance with existing regulations.*

**Keywords:** *Evaluation, Function of the Neighborhood Unit of Tiban Lama Village.*

### I. Pendahuluan

Rukun tetangga dan Rukun warga sudah ada sejak penjajahan militer Jepang dan masih ada hingga saat ini, ketika masa penjajahan Jepang Rukun Tetangga dikenal dengan istilah Tonarigumi sedangkan Rukun Warga disebut dengan Azzazyokai. Pembentukan Tonarigumi dan Azzazyokai

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

bertujuan untuk merapatkan barisan di antara para penduduk Indonesia. Sistem ini bermaksud menegakkan pengendalian pemerintah militer Jepang terhadap penduduk. Sistem Rukun Tetangga dan Rukun Warga ini semula hanya ditetapkan di Yogyakarta pada masa Sultan Hamengku Buwono IX. Tetapi setelah Indonesia merdeka, sistem Rukun Tetangga dan Rukun Warga itu disebarkan di seluruh Indonesia dan sampai sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi dari pemerintahan kelurahan di kota atau pemerintahan desa.

Rukun Tetangga merupakan suatu kumpulan penduduk yang berdiam dalam suatu lokasi tertentu dalam suatu kelurahan yang berintraksi secara langsung maupun tidak langsung diantara mereka kumpulan penduduk ini diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah, kerukunan adalah bagian dari kerjasama yang mencakup gotongroyong dan tolong menolong. Rukun Tetangga merupakan suatu bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni yang bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan.<sup>4</sup>

Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Rukun Tetangga dan Rukun Warga disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, Pasal 3 Tugas dan Fungsi adalah sebagai berikut :<sup>5</sup>

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
- d. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Dan pada pasal 15 berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2007 RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi:

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam merupakan daerah yang kaya salah satunya berpenghasilan pupuk kompos dan perkebunan, dan secara administrative Kota Batam mempunyai 12 Kecamatan salah satunya Kecamatan Sekupang yang terdiri dari 7 Kelurahan, untuk Kelurahan Tiban Lama mempunyai RW 15 dan RT 62 yang dalam hal ini RT mempunyai peran penting sebagai perpanjangan tangan dari Lurah dan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007 dan Tugas dan Fungsi Pedoman dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan pada Pasal 15.

Berdasarkan Pasal 15 diatas maka tugas dan fungsi RT/RW dalam melaksanakan tugas ada 4, yang terjadi pada Kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam pembentukan Rukun Tetangga sesuai dengan peraturan Pemerintah bahwa tugas Rukun Tetangga adalah menjadi perpanjangan tangan pemerintah di Daerahnya masing-masing.

Fenomena yang terjadi di Kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam sesuai dengan tugas pokok Rukun Tetangga berdasarkan Pasal 15 Tugas dan Fungsi, hal ini belum terlaksanakan oleh Rukun Tetangga di Kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam.

---

<sup>4</sup> Rahyunir Rauf, 2015. *Lembaga Kemasyarakatan Indonesia*, Zanafa Publishing, Pekanbaru.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan*.

Dari Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2007 pasal 15 diatas ada beberapa item yang belum dalam dilaksanakan dengan baik, dari data penulis melihat ada 1 item yang belum bisa dipenuhi oleh kinerja Rukun Tetangga di Kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam, yang mana peran Rukun Tetangga jauh dari kata terlaksana dengan Pasal 15 Tugas dan Fungsi yaitu seperti

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;

Fenomena lain yang terjadi di Kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang dimana masyarakat banyak yang tidak terlayani apalagi Rukun Tetangga di Kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam tidak mengetahui tugas pekerjaannya, sehingga angka kependudukan yang harus dilaporkan setiap bulannya kepada atasan (Lurah) sering tidak ada.

Peran Rukun Tetangga di Kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam dalam hal ini jauh dari ekspektasi masyarakat, sehingga banyak permasalahan yang terjadi di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan Fungsi nya Rukun Tetangga seakan kurang memahami kinerjanya, hal ini juga menjadi penghambat kinerja Kelurahan Tiban Lama dalam memenuhi pelayanan pemerintah daerah maupun pusat, hal ini seharusnya diperhatikan oleh pemerintah karena peran Rukun Tetangga sangatlah vital dalam perpanjangan tangan di daerah, dan Rukun Tetangga merupakan pemimpin masyarakat yang seharusnya bisa dipercayai dan mempunyai pemahaman yang tinggi dari anggota yang dipimpinnya, sehingga dengan factor diatas akan mempermudah kinerja Kelurahan dalam melaksanakan tugas Pemerintahan baik itu secara administrasi maupun hal-hal lainnya. Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Lurah Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam ”**.

### **1.1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melihat bahwa Kinerja Rukun Tetangga di Kelurahan Tiban Lama Kota Batam belum terlaksana sesuai dengan Tugas fungsi pokoknya (Tupoksinya) sehingga hal ini menjadi permasalahan dimasyarakat, untuk itu penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Lurah Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam.

### **1.2. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok – pokok masalah yang diajukan diatas, tujuan penelitian ini dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan Menganalisa Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Lurah Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam.
2. Untuk mengetahui dan Menganalisa hambatan-hambatan Pelaksanaan Fungsi Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Lurah Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam.

### **1.3. Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Kegunaan Teoritis**

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu pemerintahan yang berhubungan dengan Kinerja Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Lurah Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam.

#### **1.3.2. Kegunaan Praktis**

Secara Praktis penelitian ini dapat berguna kepada pengambil kebijakan dalam menemukan solusi yang bermanfaat khususnya pada Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Lurah Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam Tahun 2018.

## II. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasikan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistic. Dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data Arikunto (2006 : 158) mengungkapkan bahwa dengan observasi peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, khususnya yang berada dalam lingkungan itu, karena telah dianggap “biasa” dan karena itu tidak akan terungkap dalam wawancara. Melalui observasi juga dapat diperoleh kesan pribadi dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan ke dalam unit-unit, melakukan, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel. 3 Informan**

| <b>NO</b> | <b>INFORMAN</b>   | <b>JUMLAH</b>   |
|-----------|-------------------|-----------------|
| <b>1</b>  | Lurah             | 1               |
| <b>2</b>  | Kasi Pemerintahan | 1               |
| <b>3</b>  | Rukun Warga       | 4               |
| <b>4</b>  | Rukun Tetangga    | 6               |
| <b>5</b>  | Tokoh Masyarakat  | 4               |
| <b>6</b>  | Masyarakat        | 10              |
|           | <b>JUMLAH</b>     | <b>26 Orang</b> |

*Sumber : Data olahan peneliti, 2019*

## III. Hasil dan Pembahasan

Dalam pelaksanaan Fungsi Rukun Tetangga di kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam, dibuat beberapa indikator penilaian yang menjadi bahan untuk menggali permasalahan pelaksanaan fungsi kinerja Rukun Tetangga yang tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 pada Pasal 15. Indikator penilaian di dasarkan pada kriteria – kriteria evaluasi kebijakan publik yang meliputi efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsifitas, dan ketepatan.

### a. Efektivitas

Efektivitas pelaksanaan Fungsi Rukun Tetangga sudah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 15 Tentang Fungsi Rukun Tetangga, dalam hal ini seharusnya dalam pelaksanaan fungsi tersebut harus berpacu pada peraturan diatas, akan tetapi realitanya tidak kesesuaian yang terjadi dilapangan.

b. Efisiensi

Efisiensi (Efficiency) berkenaan dengan fungsi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan pada Pasal 15 tentang Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang tujuannya untuk mencapai efektivitas tertentu. Efisiensi pelaksanaan tugas dapat terlihat bilamana pelaksanaan fungsi Rukun Tetangga telah berjalan dengan baik dan efisien, sehingga keberhasilan pelaksanaan Fungsi Rukun Tetangga tidak dilihat hanya dari efektifitas pelaksanaan, melainkan juga dapat melihat dari efisiensi pelaksanaan.

c. Kecukupan

Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas dan efisiensi dalam memenuhi pelaksanaan fungsi Rukun Tetangga di Kelurahan Tiban Lama. Kecukupan sarana dan prasarana dalam Pelaksanaan fungsi Rukun Tetangga sesuai pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 15, berkaitan dengan sejauh mana fungsi Rukun Tetangga sebagai sasaran dari pelaksanaan didalam mencukupi kebutuhannya dalam menjalankan Fungsi tersebut.

d. Perataan

Perataan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas dan menunjukan pada distribusi pelaksanaan Fungsi Rukun Tetangga dilingkungan masyarakat. Perataan data dan memberikan pelayan administarsi secara merata adalah tugas Rukun Tetangga sebagai perpanjangan tangan dari Kelurahan, selain itu juga perataan sosialisasi dan pemberdayaan Rukun Tetangga merupakan hal yang sewajibnya diterima oleh Rukun Tetangga dalam pelaksanaan fungsinya sehingga Rukun Tetangga mampu melaksanakan tugas dengan baik.

e. Responsivitas

Responsivitas (responsiveness) berhubungan dengan seberapa jauh pelaksanaan fungsi Rukun Tetangga dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, prefensi atau nilai – nilai kekeluargaan dilingkungan masyarakat.

f. Ketepatan

Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan ketepatan dalam pelaksanaan fungsi Rukun Tetangga di Kelurahan Tiban Lama tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama – sama. Ketepatan pelaksanaan Fungsi ini mengacu pada apakah pada pelaksanaan sesuai pada aturan sehingga sinkron dengan apa yang terjadi dilapangan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan Fungsi Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Lurah Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam belum terlaksana dengan baik, dari hal tersebut ada beberapa yang harus diperbaiki untuk lebih jelas dapat dilihat pada identifikasi masalah yang telah dibuat oleh peneliti. Peneliti membuat identifikasi masalah dengan berdasarkan pada observasi awal dilapangan, yaitu sebgai berikut :

1. Kurangnya koordinasi dari lembaga pemerintah yang terkait dengan tugas dan fungsi Rukun tetangga yang di atur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan, sehingga Tugas dan fungsi RT belum terlaksana dengan baik.

2. Pemberitahuan tentang adanya rapat yang belum berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan banyaknya Rukun Tetangga di Tiban Lama jarang mengikuti rapat yang diselenggarakan oleh Kelurahan, hal ini juga membuat Rukun Tetangga tidak efektif dan efisien dalam melaksanakan Tugas akibat kurangnya Komunikasi antara Rukun Tetangga dan pihak Kelurahan.
3. Sosialisasi dan pemberdayaan Rukun Tetangga yang masih belum ada pada tingkat pelaksanaan fungsi Rukun Tetangga yang mengakibatkan tidak sinkronnya pelayanan administrasi dan pendataan masyarakat.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana dari melaksanakan fungsi RT seperti tidak adanya bantuan pemerintah Kelurahan dalam merealisasikan tugas mendata masyarakat, dalam hal ini yang dibutuhkan Rukun Tetangga adalah bantuan dana untuk menjalankan transportasi mereka dalam mendata masyarakat yang jumlahnya banyak.
5. Kurangnya kesejahteraan bagi Rukun Tetangga, akibat dari seringnya keterlambatan gaji yang keluarannya pertriwulan sekali dalam 1 Tahun, akibatnya banyak persepsi Rukun Tetangga sebagai kerja sambil semata bukan menjadikan tugas tersebut sebagai perpanjangan tangan Lurah yang mempunyai peran krusial dalam pemerintahan Kelurahan.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya pendidikan yang memadai di tingkat masyarakat, termasuk pendidikan yang di miliki oleh Rukun Tetangga. Sehingga Rukun Tetangga tidak bisa melaksanakan tugas serta memahami ketentuan peraturan yang ada.
- b. Kurangnya sosialisasi pemerintah kepada Rukun Tetangga terkait fungsi yang ada pada peraturan, sehingga hal ini berdampak pada kinerja Rukun Tetangga dilapangan.
- c. Kurangnya perhatian Rukun Tetangga dalam mengikuti kegiatan rapat yang dilakukan oleh pihak kelurahan, hal ini juga berdampak kurangnya informasi terhadap tanggung jawab yang akan diberikan pihak kelurahan kepada Rukun Tetangga.
- d. Kecilnya dana operasional/gaji yang didapatkan oleh Rukun Tetangga, sehingga kurangnya perhatian Rukun Tetangga terhadap tugas yang diberikan oleh Kelurahan.
- e. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas Rukun Tetangga yang merupakan perpanjangan tangan dari Kelurahan.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mencoba menarik kesimpulan, sebagai berikut,

1. Pelaksanaan Fungsi Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Lurah Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam belum terlaksana dengan baik, hal ini bisa dilihat dari kinerja Rukun Tetangga dalam hal pelayanan, kevalidtan data penduduk, dan kurangnya hadir Rukun Tetangga sebagai perpanjangan tangan dari Kelurahan kepada masyarakat.
2. Hambatan dalam pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga adalah kurangnya sarana dan prasarana belum memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Rukun Tetangga, hal

ini juga membuat tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pendataan masyarakat dan pelayanan administrasi di Kelurahan Tiban Lama belum maksimal, kekurangan selanjutnya adalah kecukupan mensejahterakan bagi Rukun Tetangga belum mendapatkan jaminan dari pemerintah, hal ini bisa dilihat dari insentif para Rukun Tetangga yang selalu telat keluarnya

## V. Daftar Pustaka

### BUKU

- Arikunto, Suharsimi dan Safrudin, Cepi, 2010, *Evaluasi Program Pendidikan : Pedoman Teoritis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, Hal. 1.
- Arikunto, 2010, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 1.
- Abdulsyani, *Sosiologi-Sistematika, Teori Dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Hal 129-130.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik - Teori dan Proses*, (Jakarta: PT. Buku Kita, 2008), 146-147. .
- Duadji, Noverman. 2013. *Manajemen Pelayanan Publik (Wacana Konsep, Teori dan Problema Pelayanan Publik)*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian. Universitas Lampung.
- Dunn, William N, 2003. *Evaluasi pemberdayaan masyarakat miskin*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994), Hal 257-258.
- Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: CV Alfabeta, 2008).
- Erliana Hasan, *Komunikasi Pemerintahan*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 101-102.
- Husein Umar. 2002. *Evaluasi kebijakan pemerintah*. Jakarta. Gramedia. Puataka Utama.
- Hadi, Samsul, 2011, *Metode Riset Evaluasi*, Yogyakarta, Lakbang Grafika, Hlm 13.
- Husni, H.S, 2010, *Evaluasi Pengendalian Sistem Informasi Penjualan*, Jakarta, hlm 971.
- Hessel Nogi S. *Tangkisan, Evaluasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Balairung & Co, 2003), 149
- Widjaja. HAW, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta, Raja grafindo 2013. Hlm 7.
- Koerjaraningrat. 1985. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Gramedia. Jakarta.
- Labolo Muhadam, 2011, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan pengembangannya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 27.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998), h 11.
- Mangkunegara, A.A Anwar Prabu. 2005. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Refika Aditama. Bandung.
- Moerir, H.A.S. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.

- Rahyunir Rauf, 2015. *Lembaga Kemasyarakatan Indonesia*, Zanafa Publishing, Pekanbaru
- Purwadarminto. W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Nilai Pustaka, 1986, hlm.553
- Rahyunir Rauf, 2005, *Menuju RT/RW Profesional.*, Zanafa Publishing, Pekanbaru
- Nugroho, 2008, *Kebijakan publik, dan evaluasi*. Gramed Media Komputindo. Jakarta
- Saparin, 1986. *Tata Pemerintahan dan Administarsi Pemerintahan Desa*. Ghalia Indonesia . Jakarta.
- Saparin, Sumber. 1994. *Tata Pemerintah dan Administrasi Pemerintah Desa*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Soekanto, 2012. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung. Salemba Empat.
- Sugiyono. 2010. *Metofde Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Penerbit Cv Alfabeta, Bandung: Hal.25.
- Syafiie, Kencana, Inu, DR 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta , Jawa Barat, hlm 14.
- Syafiie,Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi*. Mandar Maju , Bandung, hlm 36.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hal 29.
- Soekajido,1984. *Pengantar Konsep dan Teori Sosiologis*. Universitas Bandar Lampung.
- Talizuduhu Ndaraha, 2011, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta,hlm 7.
- Talizudhu Ndraha, 1989, *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*.Jakarta: Bina Aksara, Hal. 126.
- Talizuduhu Ndaraha, 2010, *Metedologi Ilmu Pemerintahan*, PT Rineka Cipta, Jakarta,hlm 6.
- Wirawan, 2012, *Evaluasi : Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*, Depok. PT Raja Grafindo Persada, hlm 7.
- William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), 24.
- William N. Dunn, *Public Policy Analysis; an Introductoin (Analisis Kebijakan Publik)*, terjemahan (Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya, 2003) 132.
- Yusril Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.
- Yanuar. *Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) Kelurahan Delima Pekanbaru*. Hlm 11.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.



Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 *Tentang Pembentukan Rukun Tetangga.*

Permendagri Nomor 4 Tahun 1999 *Tentang pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.*